



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

- Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan:
1. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN;
2. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN;
3. Para Direktur Utama Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III *Holding* (Persero).
- Sifat Rapat : Terbuka
Rapat ke : 1 (Satu)
Hari/Tanggal : Senin, 21 Mei 2018
W a k t u : Pukul 10.30 s.d 16.05 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat : H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPG), didampingi oleh:
1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/FPAN);
2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F.Gerindra);
3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/FPD);
4. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F.Hanura).
- Sekretaris Rapat : Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a : Membahas persiapan dan kesiapan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan pokok di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
- Hadir : 31 dari 51 Anggota Komisi VI DPR RI.
1. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN beserta jajaran;
2. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN (diwakili oleh Deputi IAF) beserta jajaran;
3. Para Direktur Utama BUMN: Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III *Holding* (Persero) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN RI; Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI (diwakili oleh Deputi IAF); serta para Direktur Utama Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III *Holding* (Persero) dibuka pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDP adalah membahas persiapan dan kesiapan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan pokok di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN RI; Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI (diwakili oleh Deputi IAF); serta para Direktur Utama Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III *Holding* (Persero) untuk menjelaskan mengenai persiapan dan kesiapan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan pokok di bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN RI; Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN RI (diwakili oleh Deputi IAF); serta para Direktur Utama Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Berdikari (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III *Holding* (Persero).

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kesiapan BUMN Pangan dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dengan tetap menjaga kualitasnya di Bulan Suci Ramadhan dan Menghadapi Idul Fitri 1439 H, khususnya dalam menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan pokok.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan kepada BUMN Pangan, dan mengoordinasikan BUMN lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN agar segera melakukan sinkronisasi dan validasi data pangan pokok secara akurat dengan instansi terkait.
4. Komisi VI DPR RI meminta Perum Bulog untuk menerapkan Sistem Informasi Logistik (SIL) yang *real-time* terkait data stok, pengadaan, penyaluran dll.
5. Komisi VI DPR RI meminta laporan realisasi Penyertaan Modal Negara PT Perkebunan Nusantara III *Holding* (Persero) dalam APBN Tahun 2015 dan realisasi Penyertaan Modal Negara Perum Bulog dalam APBN Tahun 2015 dan Tahun 2016. Komisi VI DPR RI menekankan agar dalam realisasi programnya memperhatikan kualitas dan mutu yang terbaik, serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

6. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN untuk menyampaikan laporan realisasi impor daging kerbau di tahun 2016 dari India oleh Perum Bulog, terutama data secara rinci mengenai kuota import, harga pengadaan, biaya penyimpanan, biaya distribusi dan wilayah persebaran, serta harga penjualannya.

Catatan:

- Komisi VI DPR RI meminta kepada Perum Bulog untuk menyampaikan laporan hasil pendataan stok komoditi yang dimiliki (*stock opname*) saat ini, baik data komoditi dengan kualitas yang layak maupun yang tidak layak dikonsumsi dan solusinya.
- Komisi VI DPR RI meminta Direktur Utama Perum Bulog untuk segera menyampaikan roadmap Perum Bulog ke depan.
- Komisi VI DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja/RDP/RDPU dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Direktur Utama Perum Bulog, dan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) untuk membahas mengenai kebijakan dan data importasi gula, produksi gula dan jumlah kebutuhan gula nasional.
- Komisi VI DPR RI akan melakukan kunjungan kerja untuk melihat secara langsung pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga pangan oleh BUMN Pangan.
- Komisi VI DPR RI meminta kepada BUMN Pangan untuk menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan lisan dan permintaan data dalam pendalaman rapat dengar pendapat hari ini paling lambat 1 minggu.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 16.05 WIB.